RENCANA KINERJA

TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WAJO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa berkat Rahmat, Taufiknya dan Hidayah-Nya sehingga Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Wajo dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana kerja tahun 2018 ini dibuat sebagai penjabaran lebih lanjut dan merupakan penjabaran dari rencana Strategi tahun 2014–2019. Rencana kerja menjabarkan target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun pelaksanaan dan tahun ini merupakan penyusunan Renja keempat dari Rencana Strategi tahun 2014- 2019. Target kinerja ini mempresentasikan secara kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran Strategi maupun tingkat kegiatan, dan merupakan ***Benchmark*** bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kerja tahun 2018 ini merupakan bentuk komitmen penuh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo untuk mencapai kinerja yang sebaik–baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo. Rencana kerja Tahun 2018 ini juga merupakan indikator atau tolak ukur dalam pembuatan LAKIP tahun 2018. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo pada tahun 2018 sepenuhnya mengacu pada Rencana kerja Tahun 2018.

Diharapkan Rencana kerja Tahun 2018 ini merupakan bagian dari upaya pencapaian akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo secara optimal.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan Rencana kerja tahun 2018 ini.

Sengkang , 3 Januari 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN WAJO

H. AMIRUDDIN A, S.Sos., M. M.
Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P . 19730514 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2016 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA BKPSDM 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kab. Wajo 17

2.3. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat 22

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 22

2.5 Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 30

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2016 35

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 35

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 35

3.3 Program dan Kegiatan 41

BAB IV PENUTUP 70

Lampiran Matriks Rencana Kegiatan 71

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo tahun 2018 merupakan salah satu komponen dari Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimulai dari perencanaan Strategi dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dokumen ini diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Kerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana Strategi yang berjangka waktu lima tahun. Rencana kerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaian yang memuat program–program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil yang tertuang dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Dalam tahun 2018, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo akan melaksanakan beberapa kegiatan dalam beberapa program untuk mencapai sasaran dan tujuan Strategi. Diharapkan Rencana kerja Tahun 2018 ini yang juga merupakan Rencana kerja keempat untuk periode RENSTRA 2014–2019 menjadi bagian dari upaya pencapaian akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo secara optimal sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam pembuatan Perencanaan untuk Periode 2014– 2019

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana kerja ini sangat tergantung dari kinerja aparatur pemerintah daerah, khususnya jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini rencana kerja menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus menjadi pokok perhatian oleh manajemen organisasi. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan rencana kerja sungguh merupakan issu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan yang mengarah kepada arah pelaksanaan dan pencapaian Visi dan Misi organisasi.

Renja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh organisasi melalui berbagai kegiatan tahunan. Renja harus diselaraskan dengan berbagai hal yang telah dituangkan dalam rencana strategis sehingga dapat dipantau tingkat pencapaiannya dengan lebih operasional dan melihat kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wajo merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja BKPSDM merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan pewujudan aparatur yang profesional, handal dan religius.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran *Negara* Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 126 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008 – 2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrembang (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 77);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

2018(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2001 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 9).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Tahun 2018 ini adalah dalam rangka melaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Selain itu, Renja ini bermaksud untuk memberikan acuan bagi BKPSDM Kabupaten Wajo dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan dating, menentukan lokasi program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan dating, dan memberikan acuan bagi dalam kelompok sasaran program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja BKPSDM Kabupaten Wajo tahun 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Kabupaten Wajo, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Bab ini menjelasan telaahan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2018

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA BKPSDM TAHUN 2016

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM

Untuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (RENJA) tahun 2016, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan yang telah ditetapkan.

2.1.1 Evaluasi Program Tahun 2016

Pada tahun 2016, BKPSDM Kabupaten Wajo melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 51 (lima puluh satu) kegiatan. Anggaran Belanja Langsung tahun 2016 sebesar Rp 9.760.800.000,-. Dari jumlah anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 9.287.247.152,- atau 95,15% .

2. 1.2 Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM, serta pelaksanaan kesekretariatan Badan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk tahun berjalan yakni Anggaran 2017 dengan anggaran sebesar ***Rp. 9.290.800.000,-*** terurai dalam 5 Program dan 50 Kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan Tahun 2016.

TABEL 2.1

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016

(SUMBER DANA APBD KABUPATEN WAJO)

PERIODE DESEMBER 2016

NO.	NAMA KEGIATAN	SUMBER DANA APBD II (RKA) Rp	REALISASI DANA APBD II (Rp)	(%)	KET.
1	2	3	4	5	6
I	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.675.216.078,00**	**2.687.505.684**	**100,46%**	
1	Belanja Pegawai	2.675.216.078,00	2.687.505.684	100,46%	
II	**BELANJA LANGSUNG**	**9.760.800.000**	**9.287.247.152**	**95,15%**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1.542.871.500**	**1.452.787.140**	**87,27%**	
1	Penyediaan jasa surat -Menyurat	188.500.000	170.490.000	90,45%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	495.309.500	463.429.634	93,56%	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	10.000.000	5.321.090	53,21%	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuagan	50.800.000	47.647.000	93,79%	
5	Penyediaan Kebersihan Kantor	29.000.000	17.000.000	58,62%	
6	Penyediaan Jasa Pertakian Peralatan Kerja	42.200.000	42.200.000	100,00%	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	5.000.000	5.000.000	100,00%	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	55.000.000	54.915.000	99,85%	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	564.662.000	560.940.120	99,34%	
10	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	102.400.000	85.844.326	83,83%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1.232.300.000**	**1.111.611.252**	**83,12%**	
1	Pengadaan kendaraan Sepda Motor Roda dua	21.000.000	17.971.000	85,58%	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	280.000.000	267.737.100	95,62%	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	474.000.000	458.030.000	96,63%	
4	Pengadaan Mobilitur	194.300.000	143.570.000	73,89%	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00%	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan/Dinas Operasional	55.000.000	16.645.152	30,26%	
7	Rehabilitasi Ringan Berat Gedung Kantor	198.000.000	197.658.000	99,83%	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**42.000.000**	42.000.000	0,00%	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapanya	42.000.000	42.000.000	0,00%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**4.208.063.000**	**4.149.903.000**	**98,27%**	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	65.300.000	65.300.000	100,00%	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	422.960.000	382.095.000	90,33%	
3	Pendidikan dan PelatihanPrajabatan Bagi Calon PNS Daerah	420.950.000	419.580.000	99,67%	
4	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	2.179.231.000	2.169.786.000	99,57%	
5	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi Bagi PNS Daerah	326.607.000	324.447.000	99,34%	
6	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	599.995.000	595.955.000	99,33%	
7	Diklat Teknis Manajemen ASN	182.200.000	182.160.000	99,98%	
8	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuagan Berbasis Akrual TA 2016	10.800.000	10.580.000	97,96%	
	Program Perencanaan,Pelaporan Kinerja dan Keuangan	**37.575.000**	**37.227.000**	**99,07%**	
1	Asistensi Penyusunan RKA Pokok dan Perubahan	6.650.000	6.640.000	99,85%	
2	Penyusunan Renja SKPD	6.275.000	6.271.000	99,94%	
3	Penyusunan Lakip SKPD	6.750.000	6.521.000	96,61%	
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.900.000	7.895.000	99,94%	
5	Revisi Renstra	10.000.000	9.900.000	99,00%	

NO.	NAMA KEGIATAN	SUMBER DANA	REALISASI DANA		KET.
		APBD II (RKA) Rp	APBD II		
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	**2.532.390.500**	**2.328.765.760**	**99,14%**	
1	Seleksi Penerimaan CPNS	-	-		
2	Penempatan PNS	280.800.000	200.445.000	71,38%	
3	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	404.617.500	402.986.700	99,60%	
4	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	95.025.000	93.244.100	98,13%	
5	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	20.000.000	15.264.400	76,32%	
6	Pensiun PNS	219.479.000	216.896.260	98,82%	
7	Penataan dan Pemetalaan PNS	108.400.000	100.285.200	92,51%	
8	Penyelenggaraan Ujian Dinas Bagi PNS	94.600.000	90.165.000	95,31%	
9	Analisa Kebutuhan Diklat,Monitoring dan Evaluasi hasil Diklat	29.600.000	29.580.000	99,93%	
10	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin PNS	150.000.000	144.588.000	96,39%	
11	Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	31.025.000	29.288.000	94,40%	
12	Asistensi dan Evaluasi penyelesian LPZP	131.089.000	128.666.400	98,15%	
13	Asistensi dan Fasilitasi Penilaian Sasaran Kerja Pegawai	101.250.000	96.714.000	95,52%	
14	Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator	549.375.000	482.630.700	87,85%	
15	Asistensi ,Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LHKPN dan LHKASN	158.280.000	142.927.000	90,30%	
16	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Proses Akademik PNS Tugas Belajar dan Ijin Belaj	108.450.000	105.885.000	97,63%	
17	Pelatihan e-KINERJA	50.400.000	49.200.000	97,62%	
	Program Penataan Sistem Informasi Kepegawaian	**165.600.000**	164.953.000	99,61%	
1	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	165.600.000	164.953.000	99,61%	
		13.436.016.078,00	**11.974.753.836**	**86,28**	

2.1.2 Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM, serta pelaksanaan kesekretariatan Badan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk tahun berjalan yakni Anggaran 2017 dengan anggaran sebesar ***Rp. 9.290.800.000,-*** terurai dalam 5 Program dan 50 Kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan Tahun 2016.

Tabel 2. .2

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BKPSDM DAN PENCAPAIAN RENSTRA BKPSDM S/D TAHUN 2017

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)			Target Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun Berjalan	
								Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi % Tahun 2016		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					Urusan Wajib								
x	xx	xx	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi perkantoran**	100%						
x	xx	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	75	60	88,74	147,90	65	148	70
x	xx	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	75	60	88,74	147,90	65	148	70
x	xx	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	75	60	88,74	147,90	65	148	70
x	xx	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	75	60	88,74	147,90	65	148	70
x	xx	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	75	60	88,74	147,90	65	148	70
x	xx	xx	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	75	60	88,74	147,90	65	148	70
x	xx	xx	01	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	75	60	88,74	147,90	65	148	70
x	xx	xx	01	12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	75	60	88,74	147,90	65	148	70
x	xx	xx	01	13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	75	60	88,74	147,90	65	148	70
x	xx	xx	01	14	Penyediaan jasa administrasi Kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	75	60	88,74	147,90	65	148	70
x	xx	xx	02		**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran**						7	
					Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
x	xx	xx	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
x	xx	xx	02	07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
x	xx	xx	02	10	Pengadaan material	Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
x	xx	xx	02	11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
x	xx	xx	02	12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
x	xx	xx	02		Rehabilitasi Bedang/ berat gedung kantor	Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)			Target Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun Berjalan	
								Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi % Tahun 2016		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
x	xx	xx	03		**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Meningkatnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara**						-	
x	xx	xx	03	06	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	75	60	88,74	147,90	65	-	70
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	75	60	-	-	65	-	70
x	xx	xx	05		**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Meningkatnya kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara**						-	
x	xx	xx	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase ASN yang lulus Pendidikan Formal dengan tepat waktu dan predikat Baik	90%	70%	100%	133,33%	80%	133,33%	85%
x	xx	xx	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan dengan predikat Baik	5 Tahun	71%	99,63%	140,32%	73%	140,32%	77%
x	xx	xx	16	01	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi calon PNSD	Persentase ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan dengan predikat Baik	81%	71%	99,63%	140,32%	73%	140,32%	77%
x	xx	xx	16	02	Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNSD	Persentase ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan dengan predikat Baik	81%	71%	99,63%	140,32%	73%	140,32%	77%
x	xx	xx	16	03	Pendidikan dan pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD	Persentase ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan dengan predikat Baik	81%	71%	99,63%	140,32%	73%	140,32%	77%
x	xx	xx	16	04	Pendidikan dan pelatihan Fungsional bagi PNSD	Persentase ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan dengan predikat Baik	81%	71%	99,63%	140,32%	73%	140,32%	77%
x	xx	xx	17	35	Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian	Persentase ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan dengan predikat Baik	90%	71%	99,63%	140,32%	73%	140,32%	77%
x	xx	xx	17		Bimbingan Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual	Persentase ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan dengan predikat Baik	-	71%	99,63%	140,32%	73%	140,32%	77%
x	xx	xx	17		**Program Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan**	**Tersedianya data dan informasi serta laporan hasil pengelolaan keuangan daerah**						3	
x	xx	xx	06	07	Penyusunan LAKIP SKPD	Hasil Penilaian evaluasi AKIP	75	60	72,64	121,06	65	72,64	70
x	xx	xx	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
x	xx	xx	21	37	Penyusunan RENJA SKPD	Hasil Penilaian evaluasi AKIP	75	60	72,64	121,06	65	72,64	70
x	xx	xx	21	36	Penyusunan Renstra/ Revisi Renstra SKPD	Hasil Penilaian evaluasi AKIP	75	60	72,64	121,06	65	72,64	-
x	xx	xx	17	21	Asistensi Penyusunan RKA Pokok dan Perubahan	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	75	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)			Target Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun Berjalan	
								Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi % Tahun 2016		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
x	xx	xx	17		**Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**Meningkatnya kualitas pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pola koordinasi bagi pengelola ASN, meningkatnya kesejahteraan, motivasi dan disiplin ASN serta meningkatnya kualitas Sistem Informasi Manajemen ASN yang berbasis SAPK**							
x	xx	xx	17	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	75%	63%	90.15%	143.09%	67%	100%	71%
x	xx	xx	17	03	Pengambilan Sumpah Jabatan/ Pelantikan Pejabat JPT, Administrator dan Pengawas	Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	75%	63%	90.15%	143.09%	67%	100%	71%
x	xx	xx	17	04	Penataan Sistem administrasi kenaikan Pangkat PNS	Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	96%	90%	97.30	108.11%	92%	108.11%	96%
x	xx	xx	17	08	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi	Persentase PNS yang memperoleh penghargaan tepat waktu	96%	90%	100%	111.11%	92%	111.11%	96%
x	xx	xx	17	12	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	75%	63%	90.15%	143.09%	67%	100%	71%
x	xx	xx	17	17	Pensiun PNS	Persentase Pensiun pegawai tepat waktu	97%	90%	100%	111.11%	92%	100%	95%
x	xx	xx	17	24	Penataan dan Pemerataan PNS	Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	75%	63%	90.15%	143.09%	67%	100%	71%
					Penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN	Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	75%	63%	90.15%	143.09%	67%	100%	71%
x	xx	xx	17	26	Penyelenggaraan Ujian bagi PNS	Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	75%	63%	90.15%	143.09%	67%	100%	71%
x	xx	xx	17	28	Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	75%	63%	90.15%	143.09%	67%	100%	71%
x	xx	xx	17	14	Analisis Kebutuhan Diklat,Monitoring dan Evaluasi Hasil Diklat	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan	81.00%	71%	99.63%	140.32%	75.00%	140.32%	77.00%
x	xx	xx	17	31	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin PNS	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	100%	85%	73.9%	86.94%	90%	86.94%	95%
x	xx	xx	17		Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja PNS	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	100%	-	-	-	85.00%	-	90%
x	xx	xx	17	32	Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	100%	85%	73.9%	86.94%	85.00%	86.94%	90%
x	xx	xx	17	33	Asistensi dan Fasilitasi Penilaian Sasaran Kerja Pegawai	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	100%	85%	73.9%	86.94%	85.00%	86.94%	90%
x	xx	xx	17	34	Asistensi dan Evaluasi Penyelesaian LPCP	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	75%	65%	73.9%	86.94%	63%	86.94%	70%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)			Target Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun Berjalan	
								Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi % Tahun 2016		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	xx	xx	17		Pendataan ulang e-PUPNS	Persentase aparatur sipil negara yang datanya akurat						-	
	xx	xx	17		Seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas	Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	75%	62%	90,15%	143,08%	67%	100%	71%
	xx	xx	17		Assessmen, monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LHKASN dan LHKASN	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	75%	80%	73,9%	86,94%	63%	86,94%	70%
	xx	xx	17		Monitoring, evaluasi dan pelaporan proses akademik PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar	Persentase ASN yang lulus Pendidikan Formal dengan input waktu dan predikat Baik	90%	75%	100%	133,33%	80%	133,33%	85%
	xx	xx	17		Pelatihan e-Kinerja	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	100%	85%	73,9%	86,94%	85,00%	86,94%	90%
	xx	xx	17		Penyelenggaraan Sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
x	xx	xx	17	01	Pembangunan/ Pengembangan SIMPEG	Persentase aparatur sipil negara yang datanya akurat	100%	85%	90,24%	106,18%	90%	100%	95%
					Program pembinaan olahraga, seni budaya, mental dan kecerdasan	Persentase Peningkatan Penataan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis SAPK						-	
					Penyelenggaraan PORSEHI KORPRI	Persentase PNS yang mengikuti olahraga, seni budaya, mental dan kecerdasan	100%	70	-	-	75	-	80
					Penyelenggaraan Kompetisi olahraga	Persentase PNS yang mengikuti kompetisi olahraga	100%	70	-	-	75	-	80
					Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)							100	
					Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan NARKOBA	Jumlah ASN yang mengikuti penyuluhan	-	100	-	-	100	100	100

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BKPSDM KABUPATEN WAJO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo berubah nama menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM, serta pelaksanaan kesekretariatan badan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKPSDM Kabupaten Wajo mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM ; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tulisan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo sebagai lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kabupaten Wajo memiliki Struktur Organisasi sebagaimana disajikan dalam Gambar sebagai berikut:

TABEL 2.3

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WAJO

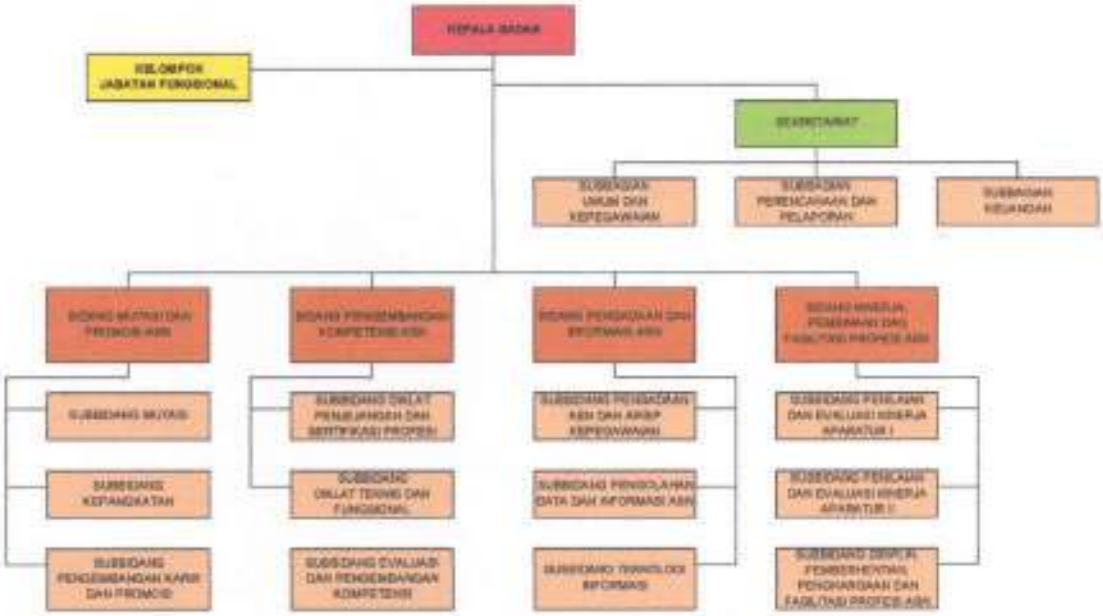

Susunan organisasi BKPSDM terdiri atas :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat :

   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
   3. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Pengadaan dan Informasi ASN :

   1. Subbidang Pengadaan ASN dan Arsip Kepegawaian;
   2. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi ASN;
   3. Subbidang Teknologi Informasi.

d. Bidang Mutasi dan Promosi ASN :

   1. Subbidang Mutasi;
   2. Subbidang Kepangkatan;
   3. Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi.

e. Bidang Pengembangan Kompetensi ASN:
   1. Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi Profesi;
   2. Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional;
   3. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan Kompetensi.
f. Bidang Kinerja, Pembinaan dan Fasilitasi Profesi ASN :
   1. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I;
   2. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II;
   3. Subbidang Disiplin, Pemberhentian, Penghargaan dan Fasilitasi Profesi ASN.
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara kuantitatif dan kualitatif sumber daya aparatur yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo masih terasa kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga masih perlu ditingkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensinya. Berikut disajikan profil sumber daya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo berdasarkan pendidikan formal dan golongan ruang.

Tabel 2.4

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT KUALIFIKASI JENJANG PENDIDIKAN FORMAL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WAJO

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV				JUMLAH
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	-	-	1	-	6	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	12
4	Sarmud/Akademi(D.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sarjana (S.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	4	2	-	-	-	-	21
6	Pasca Sarjana (S.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	-	8
7	Doktoral (S.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**-**	**-**	**1**	**-**	**6**	**4**	**-**	**-**	**6**	**11**	**5**	**4**	**2**	**2**	**-**	**-**	**41**

Tabel 2.5

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPSDM KABUPATEN WAJO

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	TARGET RENSTRA SKPD			REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI	
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(8)
1.	Terpenuhinya penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara	Persentase ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan dengan predikat Baik	%	71	73	77	99,63	73	77
			Persentase ASN yang lulus Pendidikan Formal dengan tepat waktu dan predikat Baik	%	75	80	85	100	80	85
		Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi	Persentase jabatan yang disi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	%	63	67	71	143,09	67	71
2.	Terpenuhinya Hak dan Kewajiban aparatur sipil negara secara cepat, tepat dan akurat	Meningkatnya disiplin aparatur sipil negara	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase tingkat kedisiplinan ASN	%	58	63	70	73,9	63	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase Pensiun pegawai tepat waktu	%	90	92	95	100%	92	95
			Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	%	90%	92%	96%	97,30%	92%	96%
			Persentase PNS yang memperoleh penghargaan tepat waktu	%	90%	92%	94%	100%	92%	94%
			Persentase penyelesaian gaji berkala tepat waktu	%	90%	92%	95	100%	92%	95

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	TARGET RENSTRA SKPD			REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI	
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(8)
			Persentase penyelesaian KARIS/KARSU tepat waktu	%	95%	97%	98%	100%	97%	98%
			Persentase penyelesaian kartu TASPEN tepat waktu	%	95%	96%	98%	100%	96%	98%
			Persentase penyelesaian surat izin cuti tepat waktu	%	95%	96%	98%	100%	96%	98%
			Persentase penyelesaian surat izin kawin tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	60	65	70	88,74%	88%	90%
		Tersedianya akurasi data kepegawaian	Persentase aparatur sipil negara yang datanya akurat	%	85%	90%	95%	90%	90%	95%
3	Peningkatan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKDD	Nilai evaluasi AKIP	Angka	60	65	70	72.64	65	70
			Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	%	100	100	100	100	100	100

2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Wajo sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja lingkup pemerintah daerah Kabupaten Wajo bahwa BKPSDM Kabupaten Wajo mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Wajo Tahun 2017, usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.

2.4 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BKPSDM KABUPATEN WAJO

Terselanggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita luhur bangsa dan negara sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, yaitu "mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penetapan sistem yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab.

Melihat permasalahan dan isu yang berkembang terhadap pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, sehingga perlu menetapkan dan menentukan isu-isu strategis dalam mencapai visi, misi tujuan dan

sasaran organisasi yang akan dijalankan selama lima tahun yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Badan Kepegewaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu mencermati berbagai isu strategis antara lain :

1. **Aspek Organisasi**

   Pada aspek organisasi, sejumlah kondisi yang dialami Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, antara lain :

   a. Beberapa tugas dan fungsi organisasi yang belum memiliki unit yang secara jelas menanganinya, misalnya penyusunan SOP, evaluasi dan penyempurnaan Struktur organisasi tidak relevan dengan ketentuan yang berlaku di bidang Aparatur Sipil Negara yang meniadakan eselonisasi dalam struktur organisasi.

2. **Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur**

   Pada aspek sumber daya manusia aparatur, sejumlah kondisi yang dialami Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, antara lain :

   a. Penempatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum sesuainya standar kompetensi jabatan dengan spesifikasi jabatan ;
   b. Dalam bidang pendidikan dan pelatihan pegawai, belum dilakukan perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi ;
   c. Sistem penyesuaian ijazah belum menjamin kesesuaian dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi ;
   d. Dalam hal pola karir, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Wajo belum memiliki pedoman pola karir. Terkait dengan itu,

pola rotasi pegawai yang ada juga belum mengarah pada peningkatan kompetensi dan kebutuhan organisasi ;

e. PNS ditengarai masih tidak kompeten (*incompetence)* dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik ;

f. PNS belum terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi) ;

g. PNS yang ada belum berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki *(mismatch) ;*

h. PNS belum diberdayakan secara optimal *(under empowering);*

i. Kinerja PNS masih rendah *(under performance) ;*

j. Pembinaaan dan pengembangan karier jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan pola karier PNS yang jelas ;

k. Belum terintegrasinya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan yang mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai belum merata ;

l. Pengembangan kapasitas dan kompetensi PNS belum optimal yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran penyelenggaraan diklat dan bimbingan teknis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ;

m. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang memadai sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah ;

n. Belum optimalnya pemberdayaan alumni diklat pada unit kerja masing-masing ;

o. Kurangnya minat pegawai terhadap jabatan fungsional.

3. **Aspek Tata Laksana**

Pada aspek tatalaksana, sejumlah kondisi yang dialami Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, antara lain :

a. Belum optimalnya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga masih dianggap formalitas. Selain itu, SOP yang disusun masih cenderung parsial dan belum optimalnya harmonisasi antar-SOP yang telah ada ;
b. Belum optimalnya penerapan *e-Government* di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai akibat rendahnya *e-awareness* para pegawai dan belum sempurnanya sistem informasi yang terbangun ;
c. Belum dilakukannya evaluasi SOP yang baik secara periodik, disebabkan belum adanya pedoman evaluasi SOP ;
d. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (*database*) kepegawaian yang memadai hal ini karena belum sinkronnya SIMPEG BKPSDM Kabupaten Wajo dengan SKPD ;
e. Belum dilakukannya perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi;
f. Sistem Informasi Kepegawaian telah digunakan secara efektif untuk perhitungan jumlah dan penyebaran pegawai, perencanaan pegawai dan pensiun, namun belum digunakan untuk kepentingan manajemen kepegawaian secara luas, seperti kinerja, kompetensi, promosi, dan pemberian insentif.

4. **Aspek Pengawasan**

Pada aspek pengawasan, sejumlah kondisi yang dialami Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, antara lain :

a. Atasan langsung belum melakukan tinjauan kesesuaian antara SOP dengan pelaksanaan tugas/kegiatan ;
b. Rendahnya pemahaman pegawai mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa.

5. **Aspek Akuntabilitas Kinerja**

Pada aspek akuntabilitas kinerja, sejumlah kondisi yang dialami Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo, antara lain :

a. Belum optimalnya perencanaan kinerja, diantaranya ditunjukkan oleh RENSTRA yang belum menggambarkan kondisi yang diinginkan, ketidakselarasan antara RENSTRA dengan DPA, dan efisiensi alokasi anggaran yang masih rendah ;
b. Belum optimalnya pengukuran kinerja, diantaranya ditunjukkan dengan belum adanya review kesesuaian antara rencana kinerja dengan LAKIP ;
c. Belum optimalnya pelaporan kinerja, diantaranya ditunjukkan dengan belum seluruh unit pelaksana menyampaikan laporan kinerja dan kualitas laporan kinerja yang masih rendah sehingga belum menggambarkan kinerja yang sebenarnya ;
d. Belum optimalnya evaluasi kinerja, yang ditunjukkan oleh belum adanya mekanisme evaluasi kinerja internal yang baik dan dilakukan secara berkala ;
e. Evaluasi kinerja PNS belum didasarkan pada Sistem Penilaian Kinerja berbasis *merit*, yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan kariernya dan

memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatan dan beban kerja ;

f. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan kedisiplinan dan capaian kinerja masing-masing atasan langsung kepada PNS yang berada di bawah kendali/pembinaannya.

6. **Aspek Peraturan Perundang-undangan**

Pada aspek peraturan perundang-undangan, sejumlah kondisi yang dialami Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, antara lain :

a. SOP belum sepenuhnya mengkoordinasi langkah-langkah penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi terjadinya tumpang tindih, disharmonisasi, dan multi tafsir ;

b. Pemetaan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara sempurna;

c. Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai dengan tidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. **Aspek Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur**

Pada aspek pola pikir dan budaya kerja aparatur, sejumlah kondisi yang dialami Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, antara lain :

a. Belum adanya nilai-nilai utama yang disepakati bersama sebagai landasan pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bekerja ;

b. Belum adanya sistem keteladanan (*role model*) yang dibangun;

c. Belum adanya strategi untuk mengelola perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang terdokumentasi dengan baik, lengkap dengan peta risiko kegagalan ;

d. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan kedisiplinan dan capaian kinerja oleh masing-masing atasan langsung kepada PNS yang berada di bawah kendali/pembinaannya.

Identifikasi permasalahan berkaitan dengan gambaran pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, kajian terhadap renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, kajian terhadap renstra Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara, kajian terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WAJO

No.	Aspek kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan BKDD)	Eksternal (Diluar Kewenangan BKDD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Gambaran Pelayanan SKPD	BKDD Kabupaten Wajo telah memberikan kontribusi dalam hal pelayanan kepegawaian dalam mewujudkan ASN yang lebih profesional dan sejahtera		Optimalisasi penerapan Standar Operasional Prosedur pelayanan kepegawaian dan diklat untuk peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kompetensi dan kinerja ASN	Peningkatan jumlah Anggaran kegiatan diklat serta peningkatan sarana dan prasarana kediklatan	Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan diklat, dan belum tersedianya sarana dan prasarana kediklatan yang memadai.
2.	Kajian Terhadap Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	BKD Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan manajemen ASN yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan yang profesional, tidak diskriminatif, jujur, adil, dan merata yang dilandasasi dengan etika, moral, dan semangat pengabdian yang tinggi.		Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi berbasis teknologi informasi komunikasi.	rapat-rapat koordinasi dan konsolidasi di tingkat provinsi	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang belum terintegrasi dengan BKD Provinsi Sulawesi Selatan
3.	Kajian Terhadap Renstra Kanreg IV BKN Makassar	Kantor Regional IV BKN Makassar sebagai Lembaga pusat yang memberikan layanan di tingkat regional telah berkontribusi terhadap pelayanan kepegawaian yang profesional berbasis Teknologi Informasi yang transparan dan akuntabel.		Melakukan updating/peremajaan data mutasi kepegawaian serta pelaporan secara berkala.	Optimalisasi Penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) terintegrasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian SIMPEG Instansi daerah.	SAPK belum terintegrasi dengan SIMPEG.
4.	Kajian Terhadap RTRW	Kabupaten Wajo sebagai sentra pengembangan pertanian, peternakan, dan perdagangan yang memiliki wilayah yang strategis di Sulawesi Selatan sehingga perlu adanya alokasi pegawai dan perhatian khusus untuk pengembangan kompetensi pegawai pada jabatan penyuluh pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan		Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Fungsional, serta evaluasi pasca diklat fungsional.	Peningkatan kesejahteraan Tenaga Penyuluh pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan melalui sistem reward and punishment.	Belum adanya sistem reward and punishment yang ditetapkan sebagai pengungkit kinerja ASN
5.	Kajian Terhadap KLHS	BKDD Kabupaten Wajo sebagai SKPD pendukung dalam optimalisasi Kajian lingkungan Hidup Strategis dengan melakukan analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja terhadap unit kerja pengelola teknis lingkungan hidup sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pegawai penunjang kegiatan penataan lingkungan hidup strategis.		Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Fungsional, serta evaluasi pasca diklat fungsional pengelola lingkungan hidup	Penyediaan sarana dan prasarana kajian lingkungan hidup strategis berbasis teknologi tepat guna.	Terbatasnya alokasi tambahan formasi dari Kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara untuk mengakomodir kebutuhan pegawai khusus pengelola teknis lingkungan hidup.

2.5 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review rancangan awal RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tersebut pada tabel rivieu terhadap rancangan awal renja SKPD Tahun 2018, sebagaimana tabel 2.5.1 di bawah ini :

TABEL 2.7
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Kegiatan / Output		Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Kegiatan / Output		Pagu Indikatif
			Urusan	Target				Urusan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**1.701.546.500**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**1.701.546.500**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	206.147.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	206.147.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sarana Air dan Listrik bagi Pegawai BKDD	12 Bulan	406.309.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sarana Air dan Listrik bagi Pegawai BKDD	12 Bulan	406.309.500
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	12 Bulan	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	12 Bulan	10.000.000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	50.800.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	50.800.000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Sarana Untuk menjaga Kebersihan Kantor	12 Bulan	29.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Sarana Untuk menjaga Kebersihan Kantor	12 Bulan	29.000.000
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	42.200.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	42.200.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Penyediaan Jasa Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 Bulan	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Penyediaan Jasa Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 Bulan	10.000.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	63.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	63.500.000
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah	Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah	12 bulan	662.390.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah	Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah	12 bulan	662.390.000
10	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Jasa Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	130.200.000	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Jasa Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	130.200.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Kegiatan / Output		Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Kegiatan / Output		Pagu Indikatif
			Uraian	Target				Uraian	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				830.150.000	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				830.150.000
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Dua	4 Unit	105.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Dua	4 Unit	105.000.000
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	102.150.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	102.150.000
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	200.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	200.000.000
14	Pengadaan Mebeleur	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Pengadaan Meubeleur	12 Bulan	150.000.000	Pengadaan Mebeleur	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Pengadaan Meubeleur	12 Bulan	150.000.000
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Terpeliharanya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	198.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Terpeliharanya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	198.000.000
16	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Terpeliharanya Pemeliharaan/berkala Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	75.000.000	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Terpeliharanya Pemeliharaan/berkala Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	75.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				5.002.442.000	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				5.002.442.000
17	Pendidikan Formal	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Terlaksanaanya Pendidikan Formal	10 Orang	200.000.000	Pendidikan Formal	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Terlaksanaanya Pendidikan Formal	10 Orang	200.000.000
18	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Terlaksanaanya Bimtek	12 Bulan	541.000.000	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Terlaksanaanya Bimtek	12 Bulan	541.000.000
19	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Diklat PIM	130 Orang	3.102.640.000	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Diklat PIM	130 Orang	3.102.640.000
20	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Diklat Teknis dan Fungsi	160 Orang	376.607.000	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Diklat Teknis dan Fungsi	160 Orang	376.607.000
21	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Diklat Fungsional	280 Orang	599.995.000	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Diklat Fungsional	280 Orang	599.995.000
22	Diklat Teknis Manajemen ASN	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Diklat Fungsional	160 Orang	182.200.000	Diklat Teknis Manajemen ASN	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	Tersedianya Diklat Fungsional	160 Orang	182.200.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Kegiatan / Output		Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Kegiatan / Output		Pagu Indikatif
			Uraian	Target				Uraian	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan				**27.575.000**	**Program Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan**				**27.575.000**
23	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	7.900.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	7.900.000
24	Penyusunan Renja SKPD	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Tersedianya Renja	1 Dokumen	6.275.000	Penyusunan Renja SKPD	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Tersedianya Renja	1 Dokumen	6.275.000
25	Penyusunan LAKIP SKPD	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Tersedianya LAKIP	1 Laporan	6.750.000	Penyusunan LAKIP SKPD	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Tersedianya LAKIP	1 Laporan	6.750.000
26	Asistensi Penyusunan RKA Pokok dan Perubahan	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan RKA Pokok	2 Dokumen	6.650.000	Asistensi Penyusunan RKA Pokok dan Perubahan	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan RKA Pokok	2 Dokumen	6.650.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				**3.202.202.000**	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**				**3.202.202.000**
27	Penyusunan formasi dan pengolahan e-Formasi ASN	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya penyusunan formasi dan pengolahan e-Formasi ASN	1 Kegiatan	50.000.000	Penyusunan formasi dan pengolahan e-Formasi ASN	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya penyusunan formasi dan pengolahan e-Formasi ASN	1 Kegiatan	50.000.000
28	Seleksi Penerimaan CPNS	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Tersedianya Seleksi Penerimaan CPNS	1 Kegiatan	400.000.000	Seleksi Penerimaan CPNS	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Tersedianya Seleksi Penerimaan CPNS	1 Kegiatan	400.000.000
29	Pengambilan Sumpah Jabatan / Pelantikan Pejabat JPT, Administrator dan Pengawas	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Pengambilan Sumpah Jabatan / Pelantikan Pejabat JPT, Administrator dan Pengawas	12 bulan	150.000.000	Pengambilan Sumpah Jabatan / Pelantikan Pejabat JPT, Administrator dan Pengawas	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Pengambilan Sumpah Jabatan / Pelantikan Pejabat JPT, Administrator dan Pengawas	12 bulan	150.000.000
30	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Sistem Administrasi Kepangkatan	1.300 orang	440.000.000	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Sistem Administrasi Kepangkatan	1.300 orang	440.000.000
31	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Sistem Administrasi Kepangkatan	100 Orang	95.025.000	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Sistem Administrasi Kepangkatan	100 Orang	95.025.000
32	Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Tersedianya Bantuan Penerimaan Mahasiswa Baru Ikatan Dinas (PDN/STKS)	1 Kegiatan	30.000.000	Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Tersedianya Bantuan Penerimaan Mahasiswa Baru Ikatan Dinas (PDN/STKS)	1 Kegiatan	30.000.000
33	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	1 Kegiatan	200.000.000	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	1 Kegiatan	200.000.000
34	Pensiun PNS	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Tersedianya SK PNS	180 orang	250.000.000	Pensiun PNS	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Tersedianya SK PNS	180 orang	250.000.000
35	Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LPJP	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Meningkatnya kesadaran PNS dalam Penyelesaian LPJP	1 Kegiatan	81.089.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LPJP	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Meningkatnya kesadaran PNS dalam Penyelesaian LPJP	1 Kegiatan	81.089.000
36	Mutasi Kepegawaian (Penataan dan Pemerataan PNS)	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Tersedianya Penataan dan Pemerataan PNS	12 bulan	100.000.000	Mutasi Kepegawaian (Penataan dan Pemerataan PNS)	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Tersedianya Penataan dan Pemerataan PNS	12 bulan	100.000.000
37	Ujian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Ujian Dinas bagi PNS	1 Kegiatan	130.000.000	Ujian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Ujian Dinas bagi PNS	1 Kegiatan	130.000.000
38	Analisis Kebutuhan Diklat, Monitoring dan Evaluasi Hasil Diklat	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terisinya Jabatan, Struktural/ fungsional sesuai kompetensi	1 dokumen	50.000.000	Analisis Kebutuhan Diklat, Monitoring dan Evaluasi Hasil Diklat	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terisinya Jabatan, Struktural/ fungsional sesuai kompetensi	1 dokumen	50.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Kegiatan / Output		Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Kegiatan / Output		Pagu Indikatif
			Uraian	Target				Uraian	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
39	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Disiplin PNS	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran	1 Kegiatan	75.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Disiplin PNS	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran	1 Kegiatan	75.000.000
40	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PNS	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PNS	12 bulan	162.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PNS	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PNS	12 bulan	162.000.000
41	Penyelenggaraan Sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian	12 bulan	177.000.000	Penyelenggaraan Sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian	12 bulan	177.000.000
42	Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	1 Kegiatan	50.000.000	Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	1 Kegiatan	50.000.000
43	Asistensi dan Fasilitasi Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Asistensi dan Fasilitasi Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	1 Kegiatan	110.000.000	Asistensi dan Fasilitasi Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Asistensi dan Fasilitasi Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	1 Kegiatan	110.000.000
44	Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dan Pengawas	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratma dan Administrator dan Pengawas	1 Kegiatan	400.000.000	Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dan Pengawas	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratma dan Administrator dan Pengawas	1 Kegiatan	400.000.000
45	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LHKPN	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LHKPN	1 Kegiatan	81.089.000	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LHKPN	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LHKPN	1 Kegiatan	81.089.000
46	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LHKASN	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LHKASN	1 Kegiatan	81.089.000	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LHKASN	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LHKASN	1 Kegiatan	81.089.000
47	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Proses Akademik PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Proses Akademik PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar	1 Kegiatan	100.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Proses Akademik PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Proses Akademik PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar	1 Kegiatan	100.000.000
	Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)				**75.000.000**	**Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)**				**75.000.000**
48	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba bagi ASN	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	1 Kegiatan	75.000.000	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba bagi ASN	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	1 Kegiatan	75.000.000
	Program Pembinaan Olahraga Berprestasi bagi ASN				**250.000.000**	**Program Pembinaan Olahraga Berprestasi bagi ASN**				**250.000.000**
49	Penyelenggaraan PORSENI KORPRI	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya penyelenggaraan PORSENI KORPRI	1 Kegiatan	250.000.000	Penyelenggaraan PORSENI KORPRI	SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)	Terlaksananya penyelenggaraan PORSENI KORPRI	1 Kegiatan	250.000.000
			JUMLAH		**11.088.005.500**			**JUMLAH**		**11.088.005.500**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, secara operasional bidang kepegawaian tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah. Salah satu program wajib tersebut pada era otonomi daerah saat ini lebih menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara pemerintahan yaitu PNS, sehingga kebutuhan akan PNS di daerah belum terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo yang telah dikaji kebutuhannya oleh BKPSDM melalui kajian bezetting formasi PNS masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat. Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan kepegawaian melibatkan pemerintah daerah atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo dimaksudkan untuk :

a. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo dalam Rencana

Program/Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2018,

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2018,
c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo,
d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan di antara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo,
e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo.

Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis merupakan instrumen pencapaian visi dan misi organisasi, visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi.

A. Pernyataan Visi

Dalam upaya mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maka Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dirumuskan berdasarkan nilai–nilai luhur yang ada pada masyarakat, potensi sumber daya yang ada, tantangan yang akan dihadapi serta hasil yang diharapkan dalam periode tertentu di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan gagasan dan harapan dari berbagai lapisan masyarakat dan *stakeholders* dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya ke depan, Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo adalah :

"Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan Berkinerja Tinggi"

Makna pokok yang terkandung dalam Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo tersebut antara lain :

1. Aparatur Sipil Negara yang profesional mengandung makna bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara negara diharapkan mampu memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan benar, produktif, kreatif, inovatif, pantang menyerah, dan unggul dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan dan sikap/ perilaku sesuai dengan nilai-nilai kearifan budaya lokal Wajo (*Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge*) sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai pelayan, pengayom dan motivator bagi masyarakat.
2. Aparatur Sipil Negara yang berkinerja tinggi mengandung makna bahwa Aparatur Sipil Negara diharapkan memiliki etos kerja yang tinggi serta mampu merencanakan dan mencapai target-target kerja yang diharapkan melalui budaya kinerja yang berorientasi kepada hasil.

Pernyataan Visi tersebut merupakan harapan yang ingin dicapai untuk mewujudkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian di Kabupaten Wajo. Manajemen kepegawaian dapat dikerangkakan pada terwujudnya *Good Governance* melalui peningkatan akuntabilitas oleh segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Wajo.

B. Pernyataan Misi

Pernyataan Visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh Aparat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo. Sebagai bentuk nyata dari Visi tersebut, ditetapkan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo untuk menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak pada Visi akan lebih nyata.

Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas aparatur sipil negara;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel.

Misi tersebut disusun berdasarkan pertimbangan adanya kebutuhan ataupun tuntutan masyarakat yang memungkinkan adanya akuntabilitas penyelengaraan pemerintah, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik.

C. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta faktor-faktor penentu keberhasilan, maka ditetapkan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan, serta merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2014–2019 sebagai berikut :

1. Terpenuhinya penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan sesuai dengan kompetensi;

2. Terpenuhinya Hak dan Kewajiban aparatur sipil negara secara cepat, tepat dan akurat;
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja.

D. Sasaran 2014-2019

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara.
2. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi.
3. Meningkatnya disiplin Aparatur Sipil Negara.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.
5. Tersedianya akurasi data kepegawaian.
6. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD.

Untuk melihat tujuan, sasaran RENJA BKPSDM dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.1.
TUJUAN DAN SASARAN RENJA BKPSDM
KABUPATEN WAJO

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target kinerja Sasaran pada tahun ke–				
					I	II	III	IV	V
					2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terpenuhinya penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara	Persentase ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan dengan predikat Baik	%	67	71	73	77	81
			Persentase ASN yang lulus Pendidikan Formal dengan tepat waktu dan predikat Baik	%	70	75	80	85	90
		Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi	Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	%	60	63	67	71	75
2.	Terpenuhinya Hak dan Kewajiban aparatur sipil negara secara cepat, tepat dan akurat	Meningkatnya disiplin aparatur sipil negara	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS	%	100	100	100	100	100
			Persentase tingkat kedisiplinan ASN	%	80	85	90	95	75
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase Pensiun pegawai tepat waktu	%	88	90	92	95	97
			Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	%	87	90	92	96	98
			Persentase PNS yang memperoleh penghargaan tepat waktu	%	88	90	92	94	97
			Persentase penyelesaian gaji berkala tepat waktu	%	85	90	92	95	98
			Persentase penyelesaian KARIS/KARSU tepat waktu	%	89	95	97	98	100
			Persentase penyelesaian kartu TASPEN tepat waktu	%	90	95	98	98	100
			Persentase penyelesaian surat izin cuti tepat waktu	%	90	95	98	98	100
			Persentase penyelesaian surat izin kawin tepat waktu	%	100	100	100	100	100
			Indeks Kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	55	60	65	70	75
		Tersedianya akurasi data kepegawaian	Persentase aparatur sipil negara yang datanya akurat	%	80	85	90	95	100
3	Peningkatan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKDD	Nilai evaluasi AKIP	Angka	50	60	65	70	75
			Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
			Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	%	100	100	100	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis, dan terpadu. Program merupakan upaya yang dilakukan untuk mengimplemen-tasikan strategis organisasi serta proses penentuan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Kinerja (Renja) tahun 2018 meliputi beberapa kegiatan dan program untuk mendukung 5 (lima) sasaran strategis. Untuk melaksanakan aktivitas ini dibutuhkan anggaran sebesar **Rp. 12.176.367.000,00** (dua belas milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), rincian pendanaan dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 3.2
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN BKPSDM TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN WAJO

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Program / Outcome		Kegiatan / Output					
								Uraian	Target	Uraian	Target			a/b/c	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0	0			-											
0	0	1		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**			**1.693.046.500**	**1.481.046.500**		**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**
0	0	1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	70	208.147.000	193.147.000	a	
0	0	1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	70	495.309.500	495.309.500	a	
0	0	1	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	70	10.000.000	10.000.000	a	
0	0	1	07	Penyediaan Jasa Adm Keuangan			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	70	50.600.000	50.600.000	a	
0	0	1	08	Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	70	29.000.000	29.000.000	a	
0	0	1	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	70	42.200.000	42.200.000	a	
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	70	10.000.000	5.000.000	a	
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	70	55.000.000	60.000.000	a	
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Dalam dan Luar Daerah			indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	70	882.390.000	482.390.000	a	
0	0	1	20	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	70	130.200.000	113.200.000	a	

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Program adhoc	Perangkat Daerah Penanggung
								Program / Outcome		Kegiatan / Output					
								Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0	0	2		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**			**725.150.000**	**881.150.000**		
0	0	2	05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	102.150.000	21.000.000	c	
0	0	2	07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	200.000.000	102.150.000	a	
0	0	2	09	Pengadaan meubelar			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	150.000.000	234.000.000	a	
0	0	2	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	198.000.000	106.000.000	a	
0	0	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	75.000.000	196.000.000	a	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
				Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	70	42.000.000			
0	0	6		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**			**4.730.242.000**	**7.273.447.000**		
1	21	16		Pendidikan dan Pelatihan Formal			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase ASN yang lulus pendidikan formal dengan tepat waktu dan predikat baik	85%	100.000.000	100.000.000	a	
0	0	5	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase ASN yang lulus pendidikan formal dengan tepat waktu dan predikat baik	77%	541.000.000	491.000.000	a	

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Potensi Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Program lainnya	Perangkat Daerah Penanggung
								Program / Outcome		Kegiatan / Output					
								Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNSD			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase ASN yang lulus pendidikan formal dengan tepat waktu dan predikat baik	77%				
1	21	16	1	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase ASN yang lulus pendidikan formal dengan tepat waktu dan predikat baik	77%	3.102.640.000	3.102.640.000	a	
1	21	16	02	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase ASN yang lulus pendidikan formal dengan tepat waktu dan predikat baik	77%	376.607.000	3.253.200.000	a	
1	21	16	03	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase ASN yang lulus pendidikan formal dengan tepat waktu dan predikat baik	77%	599.995.000	326.607.000	a	
0	**0**	**6**		**Program Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan**				**Persentase Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan**	**100%**			**20.925.000**	**20.925.000**		
0	0	6	06	Penyusunan lakip SKPD			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Hasil penyesuaian evaluasi AKIP	70%	6.750.000	6.750.000	a	
0	6	6	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	100%	7.900.000	7.900.000	a	
0	0	6	05	Penyusunan Renja SKPD			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Hasil penyesuaian evaluasi AKIP	70%	6.275.000	6.275.000	a	
0	0	0	08	Asistensi Penyusunan RKA Pokok dan Perubahan			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	100%	6.950.000	6.950.000	n	
1	**20**	**47**		**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**				**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**100%**			**2.021.803.000**	**2.739.890.500**		
1	20	47		Seleksi Penerimaan CPNS			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	71%	400.000.000	400.000.000	a	
1	20	47	04	Pengambilan Sumah jabatan/ Pelantikan Pejabat JPT, Administrator dan Pengawas			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	71%	150.000.000	364.217.500	a	

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Program alokasi	Perangkat Daerah Penanggung
								Program / Outcome		Kegiatan / Output					
								Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	20	47	08	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	90%	440.000.000	95.025.000	a	
1	20	47	12	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase PNS yang memperoleh penghargaan tepat waktu	96%	95.025.000	20.000.000	a	
1	20	47		Pemberian Bantuan Penyelenggarsan Penerimaan Praja IPDN			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	71%	20.000.000	115.600.000	a	
1	20	47		Pensiun PNS			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase pensiun pegawai tepat waktu	95%	250.000.000	250.000.000	a	*)
1	20	47	2	Terlaksananya Penyusunan formasi dan Pengoblasan e-formasi ASN			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	71%	108.600.000	144.100.000	a	
1	20	47		Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	71%	130.000.000	99.600.000	a	
1	20	47		Analisis Kebutuhan Diklat, Monitoring dan Evaluasi Hasil Diklat			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan	77%	50.000.000	50.000.000	a	
1	20	47		Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase tingkat kedisiplinan ASN	95%	75.000.000	150.000.000	a	
1	20	47		Monitoring , evaluasi dan Pelaporan Kinerja PNS			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase tingkat kedisiplinan ASN	90%	162.000.000	50.000.000	a	
1	20	47		Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase tingkat kedisiplinan ASN	90%	50.000.000	400.000.000	a	*)
1	20	47		Asistensi dan Fasilitasi Penilaian Sasaran Kerja Pegawai			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase tingkat kedisiplinan ASN	90%	110.000.000	81.069.000	c	*)

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Basaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Program	Perangkat Daerah Penanggung
								Program / Outcome		Kegiatan / Output				sifat	
								Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	20			Asistensi dan evaluasi penyelesaian LP2P						Persentase tingkat kedisiplinan ASN	70%	132.000.000			
1	20	47		Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dan Pengawas			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	71%	400.000.000	81.089.000	=	?
1	20	47		Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LHKPN dan LHKASN			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase tingkat kedisiplinan ASN	70%	162.178.000	162.178.000	c	
1	20	47		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Proses akademik PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase ASN yang lulus pendidikan formal dengan tepat waktu dan predikat baik	85%	100.000.000	100.000.000	a	
1	20	47		Penyelenggaraan Sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS	100%	177.000.000	177.000.000	a	
1	20	47		Pembangunan / Pengembangan SIMPEG			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase aparatur sipil negara yang datanya akurat	95%	170.000.000	182.250.000	a	
				Program Penataan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian											
				Program Pembinaan olahraga, seni budaya, mental dan kerohanian											
				Penyelenggaraan PORSENI KORPRI			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase PNS yang mengikuti olahraga, seni budaya, mental dan kerohanian	80%	250.000.000			
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Persentase PNS yang mengikuti kompetisi olahraga	80%	175.000.000			
				Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)											
				Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan NARKOBA			SKPD, Tempe (Jalan Kejaksaan No. 58 Sengkang)			Jumlah ASN yang mengikuti penyuluhan	100%	75.000.000			
										JUMLAH		8.191.969.000	12.179.347.000		

Jumlah dana yang dianggarkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2018 berjumlah Rp.12.176.367.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo seperti pada tabel di atas.

E. Target Kinerja 2018

Rencana Kinerja *(Performance Plan)* 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama tahun 2018. Target Kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan alat dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2018 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Berikut ikhtisar dari sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja tahun 2018

Tabel 3.3.
Rencana Strategis Tahun 2018

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	
			URAIAN	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Meningkatkan kualitas aparatur sipil negara.	Terpenuhinya penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	1. Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara. 2. Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi	Peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2	Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel.	Terpenuhinya Hak dan Kewajiban aparatur sipil negara secara cepat, tepat dan akurat	1. Meningkatnya disiplin aparatur sipil negara 2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 3. Tersedianya akurasi data kepegawaian	1. Peningkatan kualitas penyelenggara-an manajemen aparatur sipil Negara 2. Penataan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	1. Pembinaan dan Pengemba-ngan Aparatur 2. Program Pelayanan Adinistrasi Perkantoran 3. Program Disiplin Pegawai
		Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Peningkatan kesejahteraan dan pembinaan aparatur sipil negara serta koordinasi penyeleng-garaan manajemen aparatur sipil Negara 2. Peningkatan kapasitas manajemen dan kelembagaan	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tabel 3.4.
Tabel Input, Output dan Outcome Rencana Kinerja Tahun 2018

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Input : Dana	Rp.	-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan	%	-	
			Outcome : Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan	%	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Input : Dana	Rp.	3.102.640.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan	%	77	
			Outcome : Terwujudnya peningkatan profesionalisme aparatur	%	77	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
		Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	Input : Dana	Rp.	599.995.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan	%	77	
			Outcome : Terwujudnya Peningkatan Kompetensi bagi PNS Daerah	%	77	
		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Input : Dana	Rp.	376.607.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan	%	77	
			Outcome : Terwujudnya Peningkatan Kompetensi bagi PNS Daerah	%	77	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
2	Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas (Tugas Belajar)	Input : Dana	Rp.	100.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan formal	%	85	
			Outcome : Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kualifikasi dan Kompetensi	%	85	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Proses Akademik PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar	Input : Dana	Rp.	100.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan formal	%	85	
			Outcome : Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kualifikasi dan Kompetensi	%	85	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
		Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana	Rp.	541.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan	%	77	
		Diklat Teknis Manajemen ASN	Input : Dana	Rp.	-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan	%	77	
			Outcome : Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang professional	%	77	
		Seleksi Penerimaan CPNS	Input : Dana	Rp.	400.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	%	71	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
			Outcome : Tersedianya CPNS	%	71	
		Penyusunan Formasi dan Pengolahan e-formasi ASN	Input : Dana	Rp.	108.600.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	%	71	
			Outcome : Terisinya Jabatan, Struktural/ fungsional sesuai kompetensi	%	71	
		Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Input : Dana	Rp.	440.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	%	96	
		Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Input : Dana	Rp.	95.025.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase PNS yang memperoleh penghargaan tepat waktu	%	96	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
			Outcome : Termotivasinya sumber daya aparatur untuk lebih meningkatkan prestasinya	%	96	
		Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Input : Dana	Rp.	20.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	%	63	
		Pensiun PNS	Input : Dana	Rp.	250.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase pensiun pegawai tepat waktu	%	95	
			Outcome : Tersedianya SK Pensiun	%	95	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
		Pengambilan Sumpah Jabatan/ pelantikan pejabat JPT, Administrator dan Pengawas	Input : Dana	Rp.	150.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	%	71	
			Outcome : Efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	%	71	
		Ujian kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	Input : Dana	Rp.	130.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	%	71	
			Outcome : Tersedianya PNS yang lulus ujian untuk kenaikan pangkat	%	71	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
		Analisis Kebutuhan Diklat, Monitoring dan Evaluasi Hasil Diklat	Input : Dana	Rp.	50.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan	%	77	
			Outcome : Tersedianya data kebutuhan diklat dan evaluasi pasca diklat	%	77	
		Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin PNS	Input : Dana	Rp.	75.000.000	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase tingkat Kedisiplinan ASN	%	95	
			Outcome : Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS	%	95	
		Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	Input : Dana	Rp.	90.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase tingkat Kedisiplinan ASN	%	95	
			Outcome : Meningkatnya pemahaman PNS terhadap penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	%	95	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
		Asistensi dan Fasilitasi Penilaian Sasaran Kerja Pegawai	Input : Dana	Rp.	110.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase tingkat Kedisiplinan ASN	%	95	
			Outcome : Meningkatnya Pemahaman PNS terhadap Penilaian Sasaran Kerja Pegawai	%	95	
		Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LP2P	Input : Dana	Rp.	132.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase tingkat Kedisiplinan ASN	%	95	
			Outcome : Meningkatnya Kesadaran PNS dalam Penyelesaian LP2P	%	95	
		Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LHKPN dan LHKASN	Input : Dana	Rp.	162.178.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase tingkat Kedisiplinan ASN	%	95	
			Outcome : Meningkatnya Kesadaran PNS dalam Penyelesaian LHKPN	%	95	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
		Penerbitan Kartu TASPEN	Input : Dana	Rp.	-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase Penyelesaian Kartu TASPEN tepat waktu	%	98	
			Outcome : Terbitnya kartu peserta TASPEN PNS	%	98	
		Pemberian Surat Izin Cuti	Input : Dana	Rp.	-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase Penyelesaian Kartu surat izin cuti tepat waktu	%	98	
			Outcome : surat izin cuti PNS	%	98	
		Penyelenggaraan Sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian	Input : Dana	Rp.	-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase Penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS	%	100	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
		Pemberian Surat Izin Kawin	Input : Dana	Rp.	-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase Penyelesaian Kartu surat izin cuti tepat waktu	%	100	
			Outcome : surat izin cuti PNS	%	100	
		Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas	Input : Dana	Rp.	400.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi	%	71	
			Outcome : Penempatan/Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi	%	71	
		Pemberian Kenaikan Gaji Berkala	Input : Dana	Rp.	-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala	%	95	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
			Outcome : Terbitnya SK Kenaikan gaji berkala PNS	%	95	
		Penerbitan KARIS/ KARSU PNS	Input : Dana	Rp.	-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase penyelesaian Penerbitan KARIS/ KARSU tepat waktu	%	98	
			Outcome : Terbitnya KARIS/ KARSU PNS	%	98	
		Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Input : Dana	Rp.	170.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase aparatur sipil negara yang datanya akurat	%	95	
			Outcome : Terwujudnya Pengambilan Keputusan Pembinaan Kepegawaian	%	95	
		Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian	Input : Dana	Rp.	-	BKPSDM Kab. Wajo

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
			Output : Persentase aparatur sipil negara yang datanya akurat	%	95	
			Outcome : Terwujudnya Pengambilan Keputusan Pembinaan Kepegawaian	%	95	
		Pemutakhiran data pegawai	Input : Dana	Rp.	-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase aparatur sipil negara yang datanya akurat	%	95	
			Outcome : Terwujudnya Pengambilan Keputusan Pembinaan Kepegawaian	%	95	
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana	Rp.	208.147.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	70	
			Outcome : Terlaksananya Proses Surat Menyurat dengan Lancar	Indeks	70	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana	Rp.	495.309.500,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	70	
			Outcome : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks	70	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Input : Dana	Rp.	10.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	70	
			Outcome : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Indeks	70	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana	Rp.	50.800.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	70	
			Outcome : tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Indeks	70	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana	Rp.	29.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	70	
			Outcome : Tersedianya Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Indeks	70	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input : Dana	Rp.	42.200.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	70	
			Outcome : Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Indeks	70	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangungan Kantor	Input : Dana	Rp.	10.000.000	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	70	
			Outcome : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Indeks	70	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Input : Dana	Rp.	55.000.000	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	70	
			Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks	70	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar Daerah	Input : Dana	Rp.	662.390.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	70	
			Outcome : Terjalinya komunikasi dan konsultasi yang efektif	Indeks	70	
		Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana	Rp.	130.200.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	70	
			Outcome : Tersedianya Jasa Administrasi Kepegawaian	Indeks	70	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp.	102.150.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	%	100	
			Outcome : Tersedianya Perlengkapan Kantor siap pakai	%	100	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana	Rp.	200.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	%	100	
			Outcome : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	%	100	
		Pengadaan Mebeleur	Input : Dana	Rp.	150.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	%	100	
			Outcome : Tersedianya Mebeleur	%	100	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Input : Dana	Rp.	198.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	%	100	
			Outcome : Terpeliharanya Gedung Kantor	%	100	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Input : Dana	Rp.	75.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	%	100	
			Outcome : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	%	100	
5	Program Displin Pegawai	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Input : Dana	Rp.	42.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	70	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
			Outcome : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Indeks	60	
6	Program Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan	Penyusunan RENJA	Input : Dana	Rp.	6.275.000,-	
			Output : Nilai Evaluasi AKIP	Angka	70	
			Outcome : Tersedianya Laporan RENJA	Angka	70	
		Asistensi Penyusunan RKA Pokok dan Perubahan	Input : Dana	Rp.	6.650.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Nilai Evaluasi AKIP	Angka	70	
			Outcome : Asistensi Penyusunan RKA Pokok dan Perubahan	Angka	70	
		Penyusunan LAKIP	Input : Dana	Rp.	6.750.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Nilai Evaluasi AKIP	Angka	70	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
			Outcome : Tersedianya LAKIP	Angka	70	
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana	Rp.	7.900.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	
			Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	%	100	
7	Pembinaan olahraga, seni budaya, mental dan kerohanian	Penyelenggaraan Porseni KORPRI	Input : Dana	Rp.	250.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase PNS yang mengikuti olahraga, seni budaya, mental dan kerohanian	%	80	
			Outcome : Terjalinnya tali persaudaraan antar PNS	%	80	

NO	PROGRAM	KEGIATAN			TARGET	PELAKSANA
		NAMA	INDIKATOR	SATUAN		
		Penyelenggaraan Kompetisi olahraga	Input : Dana	Rp.	175.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Persentase PNS yang mengikuti kompetisi olahraga	%	80	
			Outcome : Terjalinnya tali persaudaraan antar PNS	%	80	
8	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan minuman keras dan Narkoba	Input : Dana	Rp.	75.000.000,-	BKPSDM Kab. Wajo
			Output : Jumlah ASN yang Mengikuti penyuluhan	%	100	
			Outcome : Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan bahaya Narkoba dan Minuman Keras	%	100	

BAB IV
PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Wajo Tahun 2018 merupakan dokumen formal yang mempunyai keterkaitan dengan Rencana Stratejik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Wajo Tahun 2014–2019 yang merupakan rencana bersifat umum berjangka waktu 5 tahun, dan harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Renja 2018 memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2018 guna memenuhi maksud INPRES No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.

Demikian Rencana kerja ini dibuat agar seluruh jajaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Wajo dapat menghayati dan menjadi acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

MATRIKS RENCANA KEGIATAN BKPSDM KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2018

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung jawab	JADWAL KEGIATAN											
						BULAN KE ...											
1				2	3	4											
0	0			-													
						JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
0	**0**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**												
0	0	1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	1	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	1	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	1	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	1	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	1	20	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung jawab	JADWAL KEGIATAN											
						BULAN KE....											
1				2	3	4											
0	0	2		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**													
0	0	2	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			X									
0	0	2	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			X									
0	0	2	10	Pengadaan Meubelair	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			X									
0	0	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	2	24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	8	5		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**													
1	21	16		Pendidikan Formal	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	X	X										
0	0	5	03	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	21	16	02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			X	X	X	X	X					
1	21	16	03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		X										
1	21	16	04	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		X	X		X		X	X				
1	21	16	24	Diklat Teknis Manajemen ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM									X			

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung jawab	JADWAL KEGIATAN											
						BULAN KE											
1				2	3	4											
0	**0**	**6**		**Program Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan**													
0	0	6	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	X											
0	0	6	05	Penyusunan Renja SKPD	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	X						X					
0	0	6	06	Penyusunan LAKIP SKPD	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	X	X										
0	0	0	08	Asistensi Penyusunan RKA Pokok dan Perubahan	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	X						X					X
1	**21**	**17**		**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**													
				Penyusunan formasi dan pengolahan e-Formasi ASN	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	X	X										
1	21	17	02	Seleksi Penerimaan CPNS	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	21	17		Pengambilan Sumpah Jabatan / Pelantikan Pejabat JPT, Administrator dan Pengawas	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	21	17	04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	21	17	05	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung jawab	JADWAL KEGIATAN											
						BULAN KE....											
1				2	3	4											
1	21	17	12	Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	X	X					X	X				
1	21	17		Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah/ SAPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	21	17		Pensiun PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	21	17		Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LPSP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM				X	X	X	X	X	X	X	X	
1	21	17		Ujian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	X	X	X	X	X	X	X	X				
1	21	17		Analisis Kebutuhan Diklat, Monitoring dan Evaluasi Hasil Diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM					X				X			
1	21	17		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Disiplin PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung jawab	JADWAL KEGIATAN											
						BULAN KE...											
1				2	3	4											
				Penyelenggaraan Sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	21	17		Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	X	X										
1	21	17		Asistensi dan Fasilitasi Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**											X	X
1	21	17		Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dan Pengawas	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	21	17		Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LHKPN dan LHKASN	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**		X	X	X	X	X						
1	21	17		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Proses Akademik PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X